keynote speaker

THE RELEVANCE OF ANTHROPOLOGY TO INDONESIA[1]

Amri Marzali

Stereotipe Antropologi

Secara historis, antropologi punya stereotype sebagai "*the study of Europeans on non-Europeans*" (Jonathan Benthall dalam Ahmed & Shore 1995). Karena pelaku peneliti antropologi (*the Europeans*) adalah berbeda secara kultural dari objek studinya (*the Non-Europeans*), maka antroplogi juga disebut sebagai "*the study of other culture*." Ketika ilmu ini lahir dan berkembang mekar pada akhir abad ke 19 sampai pertengahan abad ke 20, Orang Eropa, bila berhadapan dengan Orang Non-Eropa, secara umum selalu berposisi sebagai Orang Putih, Nasrani, *civilized*, kolonialis, kapitalis dan industri maju. Sedangkan Orang Non-Eropa adalah berkulit berwarna, *pagans*, *under-civilized, colonialized*, dan *foraging* atau *primitive cultivators*. Sehingga ketika berhadapan dengan masyarakat yang menjadi objek studinya, Orang Eropa itu menyebut mereka dengan berbagai istilah yang menakutkan, antara lain "tribal groups," "primitive peoples," "savages," atau "pagans." Untuk ringkasnya, dalam tulisan ini kita sebut saja ilmu antropologi itu sebagai "studi Orang Eropa tentang Orang Primitif." Pola hubungan struktural seperti ini mewarnai semua teori, metodologi, dan praktek antropologi.

Antropologi Indonesia di Zaman Kolonial

Di Indonesia, antropologi sudah dipelajari dan dikembangkan sejak masa awal kemunculannya oleh salah satu bangsa Eropa, yaitu Belanda. Objek studi mereka adalah berbagai suku-bangsa Indonesia yang semuanya tentulah "suku-suku primitif' dari sudut pandang Eropa. Beberapa studi tersebut dapat dikutip dari buku Koentjaraningrat (1969: 75-76), yaitu studi tentang betapa sengsaranya Orang Jawa yang Islam dan primitif dibanding mereka yang sudah memeluk agama Nasrani oleh S.E. Harthoorn, studi tentang Orang Batak yang kanibal oleh Burton dan Friedman, tentang Minahasa oleh Wilken, tentang Toraja oleh Kruyt dan Adriani, tentang Aceh dan Gayo oleh Snouck Hurgronje, tentang Minangkabau oleh de Josselin de Jong, tentang hukum adat oleh van Vollenhoven, tentang ekonomi pedesaan oleh Boeke, tentang *folklore* Jawa oleh Rassers, dsb.

Sejak semula, tujuan dari studi antropologi selalu bersifat ganda, yaitu bersifat *scientific* (keilmuan) dan yang bersifat kegunaan praktis (*applied*). Dalam bidang keilmuan, sebagian peneliti antropologi Belanda telah berhasil mengembangkan teori baru dari hasil penelitian lapangan di Indonesia. Pertama adalah teori "strukturalisme Belanda." Meskipun teori ini tidak sampai mengguncang pohon ilmu antropologi, sebagaimana yang terjadi pada teori "struktural-fungsional Inggris" dan "strukturalisme Perancis," namun ahli-ahli Belanda itu telah berhasil menelurkan sesuatu yang ilmiah dalam bidang antropologi dari hasil kajian-kajian lapangan mereka di Indonesia.

Dalam bidang kajian ekonomi pedesaan, ahli ekonomi Belanda, Jan Boeke, juga telah berhasil memformulasikan satu teori baru berdasarkan atas kajian lapangan di pedesaan Indonesia (dan India). Teori ini disebut dengan nama "ekonomi dualistik" (Boeke 1959). Sekali lagi, meskipun teori ini belum mampu mengguncang teori-teori *mainstream* dalam ilmu ekonomi, namun teori ini adalah sumbangan asli kajian lapangan di Indonesia. Satu lagi sumbangan teori dan konsep yang berharga dari hasil kajian lapangan ahli-ahli Belanda di Indonesia adalah apa yang disebut sebagai "penemuan hukum adat" dan "*adatrechtskringen*" oleh van Vollenhoven (1982) dan Ter Haar (1962). Mungkin masih ada lagi beberapa teori lain yang belum disebutkan dalam makalah ini karena keterbatasan waktu dan tempat.

Sementara itu, dari sudut kegunaan praktis (*applied anthropology*), antropologi sejak semula telah digunakan oleh Belanda untuk kepentingan penjajahan dan penyebaran agama Nasrani. Dalam bidang ini tercatat hasil kajian terkenal dari Snouck Hurgronje tentang Aceh dan Gayo, hasil kajian romo Adriani dan Kruyt tentang masyarakat Toraja, romo Geise tentang Orang Badui, dan guru agama Wilken

tentang Orang Minahasa. Pada zaman penjajahan Belanda, antropologi telah menjadi satu mata ajaran wajib pada sekolah tinggi pemerintahan jajahan di Belanda (Held 1953). Sebagian besar dari antropologi Belanda adalah berasal dari bekas pegawai pemerintah kolonial dan rohaniawan Nasrani. Bahkan di daerah-daerah rawan keamanan, Pemerintah Kolonial katanya selalu menunjuk ahli antropologi sebagai Residen atau Asisten Residen.

Antropologi Indonesia Setelah Merdeka

Setelah selesai perang kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950, Indonesia memasuki zaman baru sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Indonesia lepas dari zaman kolonial, mempunyai pemeritahan sendiri yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tapi apakah dengan demikian Orang Indonesia, atau tepatnya suku-suku bangsa di Indonesia tidak lagi menjadi "bangsa primitif" yang pantas untuk menjadi objek kajian ahli antropologi dari Barat sana? Bagi sebagian kecil peneliti antropologi asing, Indonesia masih merupakan lapangan penelitian tradisional. Mereka pergi ke tempat-tempat tersuruk di pulau Seram seperti yang dilakukan Roy Ellen, atau ke hutan-hutan di Jambi dan Riau seperti yang dilakukan Sandbukt. Namun sebagian besar yang lain sudah meneliti dengan tema-tema yang baru, khususnya tema-tema pembangunan.

Nampaknya, setelah banyak "bangsa-bangsa primitif," termasuk Indonesia, yang memperoleh kemerdekaan, ilmu antropologi pun mulai pula memasuki masa krisis. Para mahasiswa dan peneliti antropologi tidak lagi dapat dengan mudah melakukan kajian lapangan di negara-negara baru tersebut. Mereka perlu meminta izin dan kerjasama dari pemerintah setempat. Disamping itu, mereka pun belum tentu akan diterima dengan aman dan terbuka oleh masyarakat lokal, sebagaimana yang selama ini mereka peroleh di negara-negara jajahan. Namun demikian, alasan yang paling tepat nampaknya adalah bahwa "bangsa-bangsa primitif" itu sudah bergerak meninggalkan dunia "tribal yang primitif" berubah menjadi menjadi "masyarakat peisan yang terbelakang" (*backward peasant societies*). Hal yang serupa ini juga terjadi di Indonesia.

Antropologi dan Negara Terbelakang

Sejak masa awal kemerdekaan tahun 1950an, peneliti antropologi yang melakukan kajian lapangan di Indonesia tidak lagi berasal dari Belanda, kecuali di Propinsi Papua yang pada masa itu masih di bawah jajahan Belanda. Kebanyakan dari peneliti antropologi baru ini berasal dari Amerika Serikat. Yang paling terkenal dari penelitian baru ini adalah apa yang disebut sebagai Proyek Mojokuto, yang dilaksanakan di bawah koordinasi *Center for International Studies, Massachussetts Institute of Technology.* Anggota penelitinya adalah mahasiswa-mahasiswa doktoral antropologi dari Harvard University, yaitu Clifford Geertz, Hildred Geertz, Robert Jay, Donald Fagg, Rufus Hendon, Edward Ryan, dan Alice Dewey (Geertz 1963).

Pada masa mereka melakukan penelitian di Jawa, semangat antropologi sebagai satu ilmu eksotik tentang "Orang Primitif" sudah mulai agak luntur. Pandangan mereka mulai dirasuki oleh satu ideologi baru, yaitu antropologi sebagai satu studi tentang "masyarakat tradisional," dengan buku Rostow (1960) sebagai salah satu rujukan penting. Hal ini sekurang-kurangnya dirasakan oleh salah seorang peneliti, yaitu Clifford Geertz. Dikatakan oleh Geertz, bahwa meskipun pada akhirnya beliau berhasil menulis sebuah disertasi tentang "agama Jawa," namun topik semula penelitiannya adalah pengujian teori entrepreneurship Weber terhadap masyarakat Islam Jawa (Geertz 1963). Hal ini juga tercermin dari dibentuknya sebuah *Committee for the Comparative Study of New Nations di University of Chicago* pada tahun 1960an tersebut.

Kritik Terhadap Ilmu Antropologi

Penelitian Proyek Mojokuto terjadi hampir bersamaan dengan 2 peristiwa penting dalam ilmu antropologi, satu di Indonesia dan satu lagi di dunia antropologi secara umum. Di Indonesia, pada tahun 1957, Koentjaraningrat membuka Departemen Antropologi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. [2] Kita tidak mendapat informasi jelas tentang motivasi Koentjaraningrat membuka departemen baru tersebut di Indonesia. Beliau hanya merasa yakin bahwa ilmu ini berguna untuk Indonesia, karena masyarakat Indonesia terdiri dari bertatus-ratus suku-bangsa yang majemuk secara sosiokultural. Untuk itu diperlukan satu ilmu khusus, yaitu antropologi, baik dalam rangka mempelajari

masyarakat suku tersebut secara ilmiah, maupun untuk membangun masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu dan maju. Bagi Koentjaraningrat, antropologi adalah sebuah ilmu yang menjanjikan bagi Indonesia. Karena itu, beliau sungguh merasa kecewa ketika seorang sarjana Indonesia, Profesor Dr. T.S.G. Moelia, masih menganggap ilmu antropologi sebagai ilmu bangsa kolonial tentang "bangsa-bangsa primitif," yang tidak berguna bagi masyarakat Indonesia yang sedang bergerak maju (Koentjaraningrat 1969:108).

Peristiwa kedua adalah munculnya berbagai kritik terhadap ilmu antropologi, khususnya keterkaitan antropologi sebagai "anak dari kolonialisme" (Asad 1973). Kritik muncul di negara-negara yang paling maju dalam perkembangan ilmu antropologinya, yaitu Inggris, USA, dan Perancis. Isyu yang dikembangkan adalah menyangkut (1) *the theoretical limitations of classic anthropology and* (2) *a plea for social responsibility, value-awareness, and politically relevant anthropologial investigation*. Puncak dari kritikan ini tercetus dalam buku *Orientalism* karangan Edward Said (1979). Bagaimanpun, secara umum kritik yang dilancarkan terutama adalah yang menyangkut isyu-isyu akademik secara universal. Meskipun kritikan tersebut relevan dengan perkembangan ilmu antropologi di Indonesia, tapi relevansinya terbatas pada aspek keilmuan. Pengaruhnya belum menyentuh aspek terapan ilmu tersebut di tempat-tempat tertentu.

Dua peritiwa di atas, ditambah dengan beberapa peristiwa lain yang merupakan pengalaman pribadi saya sebagai sarjana antropologi Indonesia telah mendorong saya untuk kembali memikirkan apa yang pernah dicetuskan Koentjaraningrat tahun 1969, yaitu tentang "Arti Antropologi Untuk Indonesia Masa Ini", atau dalam kalimat saya sendiri, "Relevansi Antropologi Untuk Indonesia," seperti judul makalah ini. Namun demikian sebelum saya sampai kepada topik pembicaraan pokok ini, baiklah saya ceritakan pengalaman-pengalaman peribadi saya tersebut.

Pulang ke Indonesia Berarti "Selesai Ilmunya."

Kata orang, begitu seorang sarjana antropologi Indonesia menyelesaikan studi doktor-nya di sebuah universitas terkemuka di luar negeri maka begitu pula ilmu antropologi-nya selesai. Secara akademis dia sudah "tutup buku." Mengapa demikian? Karena setelah kembali ke Indonesia, bekerja di universitas atau di lembaga-lembaga lain, dia tidak terakses lagi dengan literatur dan jurnal mutakhir ilmu antropologi. Tidak ada perpustakaan di Indonesia, baik di universitas-universitas, lembaga pemerintah, maupun di lembaga-lembaga penelitian, yang berlangganan jurnal-jurnal ilmiah antropologi secara lengkap, apalagi membeli buku-buku baru. Jika ada (misalnya Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia), maka itupun dengan jumlah yang kurang memadai.

Alasannya adalah karena terlalu mahal bagi perpustakaan milik lembaga dan instansi tersebut untuk membeli buku baru dan berlangganan jurnal dari luar negeri. Alasan lain adalah kenyataan tentang kurangnya penghargaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi akan pentingnya fungsi perpustakaan dalam pengembangan ilmu. Universitas-universitas besar tidak memposisikan perpustakaan pada tempat yang sewajarnya. Hanya sebagai pelengkap untuk memperoleh izin operasi.

Sehingga apa yang disebarkan oleh sarjana Indonesia alumni universitas luar negeri itu kepada mahasiswanya, kalau dia bekerja sebagai dosen di sebuah universitas, adalah pengetahuan yang diperolehnya ketika dia belajar mencapai gelar master atau doktor. Pengetahuan yang mempunyai batas waktu, yaitu waktu terakhir dia belajar untuk mencapai gelar akademik di luar negeri. Pengetahuan yang diajarkan itupun sebagian besar adalah dalam bentuk bahan kuliah. Sangat kurang bahan bacaan tambahan. Karena dosen itu sendiri ketika kembali dari belajar di luar negeri hanya membawa bahan literatur yang sangat terbatas, baik karena kesulitan teknis pengiriman maupun karena kekurangan keuangan.

Dengan demikian kita bisa membayangkan, ilmu antropologi seperti apa yang diterima oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu? Tentu miskin sekali. Aksesnya terhadap literatur baru hanya terjadi ketika ada kawan yang baru pulang dari luar negeri, yang kebetulan membawa beberapa buku baru yang menarik. Maka buku-buku ini lalu dibajak beramai-ramai dengan kawan-kawan lain yang sama berminat.

Di zaman *cyber-library* ini, di mana setiap orang mungkin mengakses sumber informasi melalui email komputer, ternyata menurut

pengamatan saya, masih sedikit dosen perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Universitas Indonesia, yang mampu memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, terutama karena kekurang-penguasaan atau keterbiasaan terhadap teknologi komputer, kurang waktu untuk duduk mengoperasikan komputer, atau karena ketidak-mampuan ekonomi untuk membeli alat komputer.

Kebisuan Antropologi Dalam Wacana Krisis Sosial di Indonesia

Pengalaman kedua adalah ketika Indonesia terpuruk ke dalam sebuah krisis multidimensi antara 1997-2002. Ketika itu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa sosial-politik yang meminta perhatian ahli antropologi, seumpama kerusuhan massal di Jakarta bulan Mei 1998, konflik antara suku Madura dan Dayak di Kalimantan tahun 1999-2000, konflik antara agama di Poso dan Maluku 1999-2002, kekerasan massal di seantero Indonesia, demonstrasi massa yang penuh kekerasan, dll. Bahkan sampai kini kita masih melihat betapa mudahnya orang terpicu untuk melakukan demonstrasi.

Banyak pakar ilmu sosial yang menganalisa dan memberi jalan keluar atas peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi tidak ada ahli antropologi (Marzali 2001). Padahal semua orang seolah-olah menunggu pendapat para ahli antropologi. Apa yang akan dikatakan oleh ahli-ahli antropologi itu? Bagaimana usulan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Karena, menurut mereka, semua masalah ini berakar pada budaya. Demikianlah kenyataan yang berlaku. Saya sungguh sedih memikirkan hal ini. Dan saya berpikir bahwa kebisuan ahli antropologi ini tentu disebabkan oleh sesuatu yang tidak beres pada ilmu antropologi yang mereka terima. Mereka tidak mampu membuat antropologi relevan bagi Indonesia. Inilah tantangan yang saya rasakan sebagai ahli antropologi Indonesia (Marzali 2000; 2002).

Ilmu Ekonomi sebagai Hard Science

Pengalaman terakhir terjadi baru-baru ini saja (Juni 2005), ketika saya dengan beberapa kawan-kawan berencana mendirikan sebuah program studi di Universitas Indonesia, yaitu Program Studi Indonesia, untuk mahasiswa asing. Setelah memperoleh mata ajaran bahasa Indonesia dan beberapa mata ajaran dasar tentang Indonesia, sang mahasiswa asing diarahkan untuk memilih satu dari 5 program kekhususan yang ditawarkaan, yaitu Politik Indonesia, Ekonomi Indonesia, Kebudayaan Indonesia, Linguistik dan Kesusasteraan Indonesia, dan Hukum Indonesia. Semua peserta yang diundang menyetujui kerangka kasar ini, kecuali rekan dari Fakultas Ekonomi.

Rekan dari Fakultas Ekonomi itu mengatakan bahwa tidak ada ilmu khusus Ekonomi Indonesia. Ekonomi adalah sebuah "*hard science*" (demikian istilah yang digunakannya), yang teori, konsep, dan metodologinya dapat diterapkan terhadap seluruh jenis masyarakat di dunia. Di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tidak ada pelajaran tentang Ekonomi Indonesia, begitu juga Sejarah Ekonomi Indonesia. Pokoknya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang universal. Kawan dari bidang Politik memperkuat pernyataan kawan dari Ekonomi di atas. Bahwa yang akan kami bangun bersama adalah sebuah Program Studi ilmu wilayah (regional). Di Ekonomi tidak ada ilmu regional. Kalaupun adalah ekonomi regional, maka itu adalah dalam konteks ekonomi sebuah negara, yang pendekatannya tetap menggunakan ilmu ekonomi garis utama.

Karena kajian-kajian saya tentang ekonomi biasanya mengenai masalah ekonomi subsistens di pedesaan, dan pada umumnya dipengaruhi oleh aliran *substantivist*, khususnya yang dikembangkan oleh Hoselitz (Hoselitz 1960; Nash 1977), Polanyi (1957), Malinowski (1922), dan Boeke (1953), maka pernyataan kawan dari Ekonomi di atas sungguh mengejutkan saja. Kawan itu telah menyadarkan saya tentang betapa bodohnya saya mengenai ilmu ekonomi.

Namun demikian, hati kecil saya masih penasaran. Apakah ilmu ekonomi itu memang harus sebuah *hard science*, yang tidak mengenal teori, konsep dan metodologi lokal? Bukankah teori, konsep, dan metodologi ilmi ekonomi yang kita kenal selama ini berasal dari Eropa, yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana ekonomi Barat, atas dasar fakta-fakta, asumsi-asumsi, dan nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat Barat? Apakah upaya yang telah dilakukan oleh almarhum Mubyarto dari Universitas Gadjah Mada untuk menemukan "Ekonomi Pancasila" merupakan satu kesia-siaan kosong belaka? (Mubyarto dan Bromley 2002).

Apakah kenyataan di Indonesia, sejak dulu sampai kini, dimana sektor usaha swasta secara dominan dikuasai oleh Golongan Keturunan Cina, sementara Golongan Pribumi bersikap santai dan kurang daya entrepreneur, dapat dianalisa dan diselesaikan dengan teori, konsep dan metodologi ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh ahli-ahli dari Barat itu? Apakah masalah korupsi yang sudah begitu berkaratnya di Indonesia, yang begitu kental pengaruh faktor budaya lokal, dapat dianalisa dan diselesaikan dengan ilmu ekonomi Barat tersebut? Apakah kemiskinan di darah Nusa Tenggara Barat dan Timur dapat dibahas dan diselesaikan dengan semata-mata menggunakan paradigma ekonomi Barat itu?

Banyak lagi masalah-masalah ekonomi di Indonesia yang menggelitik perhatian saya, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan tentang kemampuan ilmu ekonomi Barat dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa Indonesia yang kompleks ini. Begitu kuatnya faktor sosiokultural lokal dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi di Indonesia, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi, sampai kepada monitoring dan evaluasi. Semuanya tidak pernah lepas dari adat kebiasaan dan struktur sosial lokal. Jika semuanya diserahkan semata-mata kepada ilmu ekonomi Barat, maka saya merasa kita tidak akan pernah mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan para Bapak Pendiri Bangsa. Keraguan saya mengenai kemampuan ilmu ekonomi Barat ini malah menambah daya dorong kepada saya, sebagai refleksi, untuk makin keras mempertanyakan relevansi antropologi dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Tanggung Jawab Ahli Antropologi Indonesia

Pemikiran tentang perlunya ahli ilmu-ilmu sosial mengembangkan disiplin ilmunya sesuai dengan kondisi sosial-politik dan nilai-nilai kultural masing-masing masyarakat sudah lama dibincangkan orang. Pertanyaan tentang "Arti Antropologi Untuk Indonesia Masa Ini," seperti yang diajukan oleh Koentjaraningrat (1969), atau "*The Call for Indigenization*," seperti yang ditulis oleh Yogesh Atal (1981), bukanlah satu pemikiran kritis yang baru terhadap antropologi. Pemikiran kritis tentang antropologi ini disimpulkan oleh Fei Hsio Tung, seorang ahli antropologi Cina, dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: "*The question is, for whose benefit and for what purpose should social anthropology be used*?" (Fei 1981). Kerisauan ahli antropologi lokal, seumpama Koentjaraningrat dari Indonesia, atau Fei Hsio Tung dari Cina adalah kerisauan saya juga pada masa akhir-akhir ini. Karena itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para sarjana antropologi Indonesia untuk bersama-sama memikirkan "Relevansi Antropologi Untuk Indonesia." Mari kita semua pikirkan "*what is the benefit and the purpose of anthropology for Indonesia*," meminjam kalimat Fei di atas. Kalau tidak ada *benefit* dan *purpose* yang jelas, mengapa tidak kita tutup saja Departemen Antropologi itu. Kita telah membohongi dan merugikan mahasiswa, dan menghabiskan dana pemerintah. Jadi, manakala Ahmed dan Shore (1995) mempertanyakan "*The Future of Anthropology. Its Relevance to the Contemporary World*," maka kita di Indonesia patut mengganti kata "*the Contemporary World*" itu dengan kata "Indonesia."

The Relevance of Anthropology to Indonesia

Postmodernitas, globalisasi, kemajuan teknologi informasi, industrialisasi dan de-industrialisasi, fundamentalisme agama, konflik etnik, kelaparan, urbanisasi, degradasi moral, perubahan pola institusi keluarga, dll. yang makin menjadi fenomena global sejak kira-kira 1980an telah memojokkan antropologi ke dalam satu situasi yang tidak menentu (*predicament*). Antropologi masuk ke dalam suatu masa krisis yang serius. Antropologi berada dalam bahaya terpinggirkan dan tidak berguna. Krisis ini mungkin akan menghancurkan teori, metode dan praktek yang selama ini telah dibangunnya, kecuali kalau dia mampu menyesuaikan diri dengan dunia yang sedang berubah. Krisis seperti apakah yang sedang dialami oleh antropologi ini? "*It is not a crisis of representation which now threatens our discipline but a problem of relevance*," kata Ahmed dan Shore (1995:15). Apakah yang dimaksudkan dengan krisis relevansi itu?

Pertama, relevansi berarti berkaitan dengan konsep "*utility*" dalam ilmu ekonomi, atau kurang lebih azaz manfaat dalam bahasa Indonesia. Manfaat ini dikaitkan dengan prinsip pasar yang bekerja memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan (Marzali 2003). Kita tidak bisa menutup mata-telinga bahwa kita kini berada dalam lingkungan masyarakat yang berorientasi ke pasar. Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah: "Manfaat apa yang dapat diberikan oleh antropologi untuk pelanggannya?"

Pengertian kedua dari relevansi adalah berkaitan dengan kekuatan "*explanatory*" dari ilmu antropologi. Sampai seberapa jauh antropologi dapat menjelaskan - menemukan faktor-faktor dari - suatu fenomena sosial secara ilmiah? Antropologi harus berpegang kepada prinsip-

prinsip ilmu sosial dan secara sadar berpikir kritis terhadap pandangan postmodernisme yang penuh dengan wacana teka-teki. Seberapa besar sumbangan teori, konsep, dan metodologi yang sudah diberikan oleh antropologi dalam menemukan dan memecahkan masalah-masalah sosial baik di Indonesia maupun di dunia umumnya?

Ketiga, relevansi berkaitan dengan "*moral significance*" dari disiplin ilmu antropologi. Ini menyangkut tentang cara dan tujuan kita menggunakan ilmu antropologi. Tentang etika keilmuan. Tentang nilai politik dari kegiatan keilmuan kita. Untuk pihak mana kita melakukan penelitian dan menulis laporan? Apakah untuk kaum neoimperialis? Untuk penguasa? Untuk "*the natives*?" Untuk kepuasan diri sendiri? Atau, untuk kemaslahatan manusia sejagad? Antropologi adalah sebuah ilmu yang berpotensi digunakan baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan kemanusiaan. Dengan sedikit pengetahuan tentang antropologi Indonesia dan ilmu intelijen, plus modal, seseorang dapat mengobarkan konflik etnik dan konflik agama yang tiada putus di Indonesia tercinta ini.

Jika Ahmed dan Shore mempertanyakan relevansi antropologi dalam konteks dunia keilmuan universal, maka sebagai bangsa Indonesia kita juga harus mempertanyakan relevansi antropologi untuk Indonesia, khususnya ketika antropologi menjadi bagian dari institusi pendidikan tinggi. Untuk itu kita perlu merujuk kepada sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu "Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996).

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, jadi termasuk pendidikan antropologi, Direktorat Pendidikan Tinggi telah menyusun satu progam khusus yang memberikan perhatian terhadap 6 aspek dalam manajemen pendidikan, yaitu *Leadership, Relevance, Academic Athmosphere, Internal Managemen and Organization, Sustainability, dan Efficiency & Productivity*, yang disingkat menjadi L-RAISE (Ibnu Hadjar 2002). Apakah yang dimaksud dengan "*relevance*" atau relevansi dalam program di atas? Relevansi berarti keterkaitan perguruan tinggi dalam memenuhi keperluan masyarakat dan dunia kerja, dan dalam menanggapi tantangan globalisasi dan pembangunan nasional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996: 123). Nampaknya pemikiran tentang relevansi dari Pemerintah Indonesia agak dekat pengertiannya dengan azaz manfaat dalam ilmu ekonomi, namun disini relevansi tersebut dilihat dari sudut pandang nasional Indonesia, bukan individual.

Adanya program pemerintah ini seharusnya mendorong para ahli antropologi, khususnya yang bekerja sebagai profesional di perguruan tinggi, untuk merancang satu bentuk pendidikan antropologi yang berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah nasional Indonesia dan permintaan pasar. Bahwa antropologi tidak boleh lagi dilihat sebagai sebuah disiplin ilmu sekedar memenuhi dorongan untuk menemukan hal-hal yang eksotik pada suku-suku primitif, atau sekedar untuk memajukan ilmu antropologi itu sendiri, tapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Ahli antropologi harus sensitif dengan masalah-masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masa kini, seumpama pengangguran, kemiskinan dan kelaparan, korupsi, penyalah-gunaan narkoba, penurunan wibawa hukum, konflik etnik dan agama, illegal logging dan banjir, pelanggaran hak azazi manusia, dan banyak lagi yang lain.

Kesimpulan

Usulan kongkrit seperti apa yang diperlukan oleh sebuah Departemen Antropologi di Indonesia pada masa kini agar disiplin ilmu ini relevan dengan Indonesia?

1. Pertama kita harus kembali melihat disiplin ilmu ini. Ilmu ini sangat berkembang di USA. Sejak masa awal pengembangannya di perguruan-perguruan tinggi di USA pada tahun 1950-1960an, antropologi sudah merupakan sebuah ilmu yang interdisiplin: gabungan dari antropologi fisik, etnolinguistik, arkeologi-prehistori, dan antropologi sosiokultural (Mandelbaum et al 1963). Di USA sendiri, pada masa kini, komposisi ke 4 subdisiplin yang membentuk ilmu antropologi ini sudah mulai digugat orang. Di Indonesia komposisi ini sudah lama tidak relevan. Ilmu linguistik atau etnolinguistik di Indonesia sudah lama berkembang sendiri di Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya). Begitu juga halnya dengan arkeologi-prehistori. Subdisiplin antropologi fisik berkembang sendiri di Fakultas Kedokteran. Sehingga, antropologi sosial-kultural dalam kenyataannya sebenarnya sudah merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri pula.
2. Karena itu, saya mengusulkan agar ilmu antropologi yang terutama dikembangkan di Departemen Antropologi di perguruan tinggi

Indonesia adalah dikonsentrasikan secara sadar pada subdisiplin antropologi sosiokultural. Hilangkan ambisi untuk menggabungkan pengembangan ke4 subdisiplin ilmu sebagaimana yang terjadi di USA pada tahun 1950-1960an. Ambisi tersebut sudah tidak relevan pada masa kini, baik dalam perkembangan antropologi secara umum, apalagi untuk Indonesia.

3. Ilmu antropologi sejak semula memang lebih didominasi oleh kegiatan penelitian dan pengajaran tentang pencarian masa lampau manusia, khususnya masa lampau manusia Barat, secara fisikal dan sosiokultural. Ilmu tentang masa lampau tentu perlu, tapi bagi Indonesia yang sedang membangun - Indonesia yang penuh dengan berbagai masalah ekonomi, politik, dan sosial yang krusial - yang memerlukan penanganan segera, maka ilmu tentang masa kini adalah lebih relevan. Saya masih ingat komentar cerdas seorang mahasiswa Indonesia muda dari Department of Economics, Boston University, yang sama mengambil doktor dengan saya pada tahun 1990an. Katanya: "Ilmu Pak Amri itu baru kita perlukan kalau nanti kita sudah makmur, kini yang diperlukan Indonesia adalah ilmu seperti yang saya tuntut, yaitu ekonomi."
4. Subdisiplin ilmu antropologi sosiokultural sendiri sebenarnya adalah sebuah bidang interdisiplin, dengan terasnya pada studi bidang keagamaan, kekerabatan dan keluarga, ekonomi, dan politik. Bidang-bidang lain yang juga sering dipelajari dalam antropologi sosiokultural antara lain adalah bidang hukum, seni, personaliti, dan ideologi dan *world view*. Antropologi sosiokultural juga merupakan sebuah ilmu yang menggunakan *multi-approach*. Dalam kajian antropologi sosiokultural peneliti dapat menggunakan pendekatan kultural, simbolik, struktural, fungsional, ekologis, historis, politikal-ekonomik, dan materialis, atau kombinasi dari beberapa pendekatan tersebut. Dengan demikian, dengan berkonsentrasi pada pengembangan antropologi sosiokultural, maka kita sudah membangun sebuah ilmu interdisiplin tersendiri. Hal ini adalah relevan dengan kecenderungan ilmu masa kini.
5. Terakhir kita juga perlu waspada bahwa satu lagi kecenderungan ilmu pada masa kini adalah *applied science*. Sebenarnya segi *applied* dari ilmu antropologi sosiokultural sudah lama digiatkan orang. Hampir semua buku *readings* dalam antropologi yang diterbitkan di USA selalu mempunyai bab-bab tentang *applied anthropology*. Ambillah beberapa diantara buku-buku tersebut, seumpama yang disunting oleh Jennings dan Hoebel (1972), Cohen (1974), Fried (1968), dan Spradley & McCurdy (1987). Di USA ada satu organisasi dengan jurnal tersendiri dari *applied anthropology* ini. Namun selama ini segi ini cenderung dipandang sebelah mata oleh kebanyakan ahli antropologi. Segi *applied* ini seringkali dianggap menurunkan gengsi antropologi. Saya justru setuju kalau yang lebih digalakkan di Indonesia adalah *applied anthropology* ini. Ini jauh lebih relevan bagi Indonesia masa kini.

REFERENSI

Ahamed, Akbar.; and Cris Shore.
1995 ***The Future of Anthropology***. New York: Athlone.

Asad, Talal (ed.).
1990 (1973) ***Anthropology and the Colonial Encounter***. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press.

Boeke, J.H.
1953 Economics and Economic Policy of Dual Societies; An Exeplified by Indonesia. Haarlem: H.D. Tjenk Willink & Zoon N.V.

Cohen, Yehudi A.
1974 (1968) ***Man Adaptation*** (2nd edition, 3 jilid). Chicago: Aldine Publishing Company.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
1996 ***Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*** 1996-2005. Jakarta.

Fei Hsiao Tung
1981 ***Toward a People's Anthropology***. Beijing: New World Press.

Fried, Morton H. ***Readings in Anthropology*** (2nd edition, 2 jilid). New York: Thomas Y. Cromwell Company, 1968.

Geertz, Clifford. ***Peddlers and Princes; Social Developmentm and Economic Change in Two Indonesian Towns***. Chicago: The University of Chicago Press, 1963.

Geertz, Clifford. ***Agricultural Involution; The Process of Ecological Change in Indonesia***. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970 (1963).

Held, G. Jan. "Applied Anthropology in Government: The Netherlands," dan ***Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory***, edited by A.L. Kroeber et al. Chicago: University of Chicago Press, 1953.

Hoselitz, Bert F. ***Sociological Aspects of Economic Growth***. New York: The Free Press, 1960.

Ibnu Hadjar, Mohammad Makin. "External Assessment in Funding Mechanism," power-point yang disajikan dalam ***Workshop on Quality Assurance and Accreditation in Higher Education***, yang diselenggarakan oleh Center of Higher Education Planning and Management Studies (CHEPMS) and QA Office, Gadjah Mada University, di Kampus UGM Bulak Sumur, Yogyakarta.

Jennings, Jesse D.; and E. Adamson Hoebel. ***Readings in Anthropology***. McGraw-Hill Book Company, 1972 (1955).

Koentjaraningrat. ***Arti Antropologi Untuk Indonesia Masa Ini***. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1969.

Koentjaraningrat. ***Beberapa Metode Antropologi dalam Penjelidikan2 Masjarakat dan Kebudayaan di Indonesia***. Jakarta: Penerbit Universitas, 1958.

Malinowski, Bronislaw. ***Argonauts of the Western Pacific***. London: George Routledge & Sons, 1922.

Mandelbaum, David G.; Gabriel W. Lasker; and Ethel M. Albert. ***The Teaching of Anthropology***. American Anthropological Association, Memoir 94, 1963.

Marzali, Amri

"Pendidikan Antropologi dan Pembangunan Indonesia", dalam ***Antropologi Indonesia***, Tahun XXIV, No. 62, Mei-Agust 2000. Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.

"Kekerasan Sosial di Kalimantan: Sebuah Analisis Antropologi Sosiokultural", dalam Jurnal ***Analisis CSIS***, Tahun XXX, No.3 Tahun 2001. Jakarta: CSIS.

"Ilmu Antropologi Bagi Indonesia Yang Sedang Membangun," dalam ***Antropologi Indonesia***, Tahun XXVI, No. 68, 2002. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.

"Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi," makalah yang dibacakan dalam ***Temu Nasional Penyelenggaraan Pendidikan KOSGORO 1957***, 21 April 2003, di Hotel Indonesia, Jakarta.

Mubyarto dan Daniel W. Bromley

2003 ***A Development Alternative for Indonesia***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Polanyi, Karl

1957 (1944) ***The Great Tranformation; The Political Economic Origins of Our Time.*** Boston: Beacon Press.

Rostow, W.W.

1960 ***The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto***. Cambridge: Cambridge University Press.

Said, Edward W.

1979 ***Orientalism***. New York: Vintage Book,

Spradley, James P.; and David W. McCurdy

1987 ***Conformity and Conflict; Readings in Cultural Anthropology*** (6th edition). Boston and Toronto: Little, Brown and Company.

Ter Haar, B.

1962 ***Adat Law in Indonesia*** (translated from the Duthch by E. Adamson Hoebel and A. Arthur Schiller). Djakarta: Bhratara.

Vollenhoven, C. van.

1982 ***Penemuan Hukum Adat Indonesia*** (terjemahan dari bahasa Belanda). Jakarta: Penerbit Djambatan.

Amri Marzali
Email: amarzali@yahoo.com
5 Juli 2005

[1] Keynote Speech dalam 4th International Symposium of the Journal ANTROPOLOGI INDONESIA, diselenggarakan oleh Depatmen Antropologi dan Jurnal Antropologi Indonesia, FISIP Universitas Indonesia, 12-15 July 2005, di Kampus UI Depok. Ini adalah draf pertama, sebaiknya jangan dikutip.

[2] Ketika itu belum ada sarjana antropologi yang bergelar doktor, juga tidak Koentjaraningrat sendiri, kecuali guru beilau, Allard. Saya menjadi mahasiswa di Departemen itu sejak tahun 1962.